

**IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PEKERJAAN LAYAK,
PERTUMBUHAN EKONOMI, INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI KOTA
BATAM**

TESIS



OLEH :

RISKA KURNIASARI

E062222005

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PEKERJAAN LAYAK, PERTUMBUHAN EKONOMI, INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BATAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh:

RISKA KURNIASARI

E062222005

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PEKERJAAN LAYAK, PERTUMBUHAN EKONOMI, INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BATAM

Disusun dan diajukan oleh

RISKA KURNIASARI

E062222005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **19 Juni 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Dr. A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dr. Andi Lukman Iwan, S.IP., M.Si
NIP. 19790106 200501 1 001

Ketua Program Studi Magister Ilmu
Pemerintahan,

Dr. A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008



PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Kurniasari

NIM : E062222005

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PEKERJAAN LAYAK, PERTUMBUHAN EKONOMI, INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BATAM** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan karya orang lain, bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan


4300FALX249926445 **Riska Kurniasari**
E062222005



ABSTRAK

RISKA KURNIASARI. *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kebijakan Penanaman Modal Terkait Pekerjaan Layak, Pertumbuhan Ekonomi, Inovasi, Industri, dan Pembangunan Infrastruktur di Kota Batam* (dibimbing oleh Andi Muhammad Rusli dan Andi Lukman Irwan).

Kota Batam berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan penanaman modal. Penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan yang layak, mengembangkan industri, mendorong inovasi, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan sebagaimana yang terdapat dalam tujuan SDGs. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanaman modal terkait dengan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* di bidang penanaman modal, Pemerintah Kota Batam telah melakukan langkah-langkah, seperti (1) menciptakan peluang pekerjaan yang layak melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan, (2) merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada sektor teknologi, manufaktur, dan pariwisata, (3) mempromosikan investasi pada industri-industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, (4) mendorong investasi dalam riset dan pengembangan dengan memfasilitasi kemitraan antara sektor publik dan swasta, dan (5) membangun infrastruktur yang berkelanjutan, baik berupa transportasi maupun pengelolaan limbah yang efisien. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pemerintah Kota Batam telah berhasil dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan memastikan investasi di bidang penanaman modal telah berkembang secara positif.

Kata kunci: implementasi, *Sustainable Development Goals* (SDGs), penanaman modal, Kota Batam



ABSTRACT

RISKA KURNIASARI. *Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Investment Policy Related to Decent Work, Economic Growth, Innovation, Industry, and Infrastructure Development in Batam City* (Supervised by Andi Muhammad Rusli and Andi Lukman Irwan).

Batam City is committed to implementing SDGs in various policies, including investment policies. Capital investment is an important instrument in encouraging economic growth, creating decent jobs, developing industry, encouraging innovation, and building sustainable infrastructure as stated in the SDGs Goals. This research aims to analyze the implementation of sustainable development goals (SDGs) in capital investment related to decent work, economic growth, industry, innovation, and infrastructure. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, and literature study. Data was analyzed through data reduction, data presentation, and data verification. In implementing the Sustainable Development Goals in the investment sector, the Batam City Government has taken steps, such as: (1) Creating decent job opportunities through training and skills development programs; (2) Stimulating inclusive and sustainable economic growth in the technology, manufacturing and tourism sectors; (3) Promoting investment in sustainable and environmentally friendly industries; (4) Encouraging investment in research and development by facilitating partnerships between the public and private sectors, and (5) Building sustainable infrastructure, both in the form of transportation and efficient waste management. The Batam City Government has succeeded in implementing sustainable development and ensuring investment in the investment sector has developed positively.

Keywords: Implementation, Sustainable Development Goals (SDGs), Capital Investment, Batam City.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul “ **IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL TERKAIT PEKERJAAN LAYAK, PERTUMBUHAN EKONOMI, INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR DI KOTA BATAM** “ dapat penulis selesaikan. Tesis ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menghantarkan kita dari zaman gelap gulita menuju zaman pencerahan seperti sekarang ini semoga segala tindakan beliau menjadi teladan bagi umat-Nya.

Setiap jalan dan proses yang penulis telah lalui memberikan pengalaman yang sangat berharga dari awal memasuki perkuliahan sampai menuju pada penyusunan Tesis ini, dan Alhamdulillah semuanya ini dengan ikhlas dan semangat serta tidak terlepas dari



dukungan pihak – pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian studi.

Oleh karena itu, apabila di dalam penyusunan Tesis ini terdapat kekeliruan dalam penulisan maka, penulis memohon maaf sebesar besarnya dan sangat membutuhkan masukan, kritik, dan saran demi perbaikan kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setingginya – tingginya dan berterima kasih sedalam - dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Bahrin Bonto dan Ibunda Bungasia yang senantiasa merawat dan membesarkan hingga saat ini serta memberi kasih sayang kepada penulis dan tak lupa menjadi motivator yang selalu memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis. Serta adik laki-laki saya Rizki Kurniawan serta adik perempuan saya Sri Rahmi Nilasari dan Anisah Lailatus Sa'adah yang saling memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain Itu, Ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.



2. Bapak Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan .
4. Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Penasehat dan Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si selaku Anggota Penasehat yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
5. Kepada para penguji penulis mulai dari Seminar Proposal, Seminar Hasil, sampai dengan Ujian Tesis, penulis sangat berterima kasih atas masukan, kritikan sekaligus arahnya demi perbaikan tesis penulis.
6. Civitas Akademik FISIP Unhas, khususnya dosen Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan dan nasihat-nasihat serta seluruh staf, para pegawai di lingkup FISIP UNHAS.
7. Dinas Penanaman Modal Kota Batam beserta jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu untuk memenuhi segala penelitian penulis di wilayah kerjanya.
8. Badan Pengusahaan (BP) Kota Batam beserta jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu untuk memenuhi



segala penelitian penulis di wilayah kerjanya.

9. Seluruh Teman – Teman Seperjuangan Penulis Angkatan 2022 Magister Ilmu Pemerintahan Hasyim, Otten, Nizar, Aiman, Sulfian, Faiz, Otten, Wahyu, Yusuf. Terima kasih atas segala pengalaman dalam berbagi pengetahuan diskusi, kebersamaan dan kebaikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan magister. Semoga Selalu diberi Kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk penyelesaian jenjang Pendidikan magister dengan baik.
10. Untuk Afifah Suadi teman seperjuangan penulis. Terimakasih atas segala dukungan, kebaikan, kebersamaan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk penyelesaian jenjang pendidikan Magister dengan baik.
11. Untuk Nurul Hidayah teman seperjuangan penulis. Terimakasih atas segala dukungan, kebaikan, kebersamaan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk penyelesaian jenjang pendidikan Magister dengan baik.
12. Untuk Adella sahabat si penulis di Batam. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik dan selalu ada dalam keadaan



apapun untuk si penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk karirnya. Semoga allah membalas semua kebaikannya.

13. Untuk Adinda Ladira sahabat si penulis di Pare-pare. Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu ada didalam situasi apapun untuk penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran karirnya. Semoga allah membalas semua kebaikannya.

14. Semua pihak yang terlibat memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih,

Makassar, 19 Juni 2024

Riska Kurniasari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	II
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I	17
LATAR BELAKANG	17
1.1. Latar Belakang	17
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	6
DAFTAR PUSTAKA	6
Implementasi Kebijakan	6



2.2.	Konsep Implementas Kebijakan Merile Grindle	10
2.3.	Sustainable Development Goals (SDGs)	12
2.3.1.	Strategi dan Implementasi menggapai Sustainable Development Goals di Indonesia.	14
2.3.2.	Tujuan Sustainable Development Goals (Sdgs)	15
2.3.3.	Sustainable Development Goals Tujuan ke-8	19
2.3.4.	Sustainable Development Goals Tujuan Ke- 9.....	22
2.4.	Pengertian Investasi	25
2.4.1.	Investasi Dalam Negeri	27
2.4.2.	Investasi Luar Negeri	28
2.5.	Kebijakan dan Peraturan	29
2.6.	Kerangka Berpikir	39
BAB III		41
METODE PENELITIAN		41
3.1.	Lokasi Penelitian.....	41
3.2.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.3.	Informan Penelitian.....	41
3.4.	Sumber data	42
3.5.	Teknik Pengumpuluan Data	42
3.6.	Fokus Penelitian.....	44
	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
	47



HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1. Sejarah Kota Batam.....	47
4.1.2. Sejarah Pemerintah Kota Batam.....	53
4.1.3. Letak Geografis Kota Batam.....	56
4.1.4. Peran Kota Batam dalam Ekonomi Nasional.....	58
4.1.5. Hubungan Sdgs dan Investasi di Kota Batam.....	62
4.2. Pelaksanaan Sustainable Development Goals (Sdgs) Terkait Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Penanaman Modal di Kota Batam.....	66
4.2.1. Keterbukaan Lapangan Pekerjaan.....	76
4.2.2. Pendapatan Asli daerah.....	80
4.4. Pelaksanaan Sustainable Development Goals (Sdgs) Terkait Industri, Inovasi Dan Infrastruktur Dalam Penanaman Modal Di Kota Batam.....	85
4.4.1. Perkembangan Infrasktruktur.....	92
4.4.2. Inovasi.....	96
4.4.3. Perkembangan Industri.....	99
BAB V.....	106
PENUTUP.....	106
5.1. Kesimpulan.....	106
5.2. Saran.....	108
↳ PUSTAKA.....	110
↳ LAMPIRAN.....	116



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Progres PMA & PMDN Sepanjang 2022 & 2023	60
Tabel 2. Peringkat Sektor Investasi Tahun 2023 Kota Batam.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sustainable Development Goals.....	17
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian.....	41
Gambar 3. Peta Wilayah Kota Batam	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin meneliti.....	117
Lampiran 2.. Surat izin Rekomendasi Penelitian.....	118
Lampiran 3. Surat Keterangan Sudah Meneliti	120
Lampiran 4. Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	121
Lampiran 5. Undang undang nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.	122
Lampiran 6. Peraturan Daerah Kota Batam No 3 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam Pada Badan Usaha Milik Daerah.....	130
Lampiran 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	132
Lampiran 8. Dokumentasi	137



BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia (Zaroni, 2015). Di tengah dinamika ini, isu pembangunan berkelanjutan semakin mendapat perhatian serius dari berbagai pihak (Simamora & Sarjono, 2022). Pada bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai suatu kerangka kerja global untuk menangani tantangan-tantangan pembangunan di seluruh dunia (Singh, 2016).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berskala dunia yang sifatnya universal, tanpa mendikotomikan antara negara berkembang dan negara maju. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian bersama untuk membangun visi global bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kewajiban bagi seluruh negara di dunia.

SDGs terlahir sebagai respon dari rasa kepedulian bersama untuk mewujudkan sebuah planet yang adil, aman dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia untuk memperjuangkan kehidupan di bumi, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. SDGs merefleksikan



moral bahwa tidak ada satupun negara yang boleh berada dalam n tertinggal, sementara negara lain mengalami kesejahteraan;

setiap individu dan negara bertanggungjawab untuk memainkan 2 peran mereka dalam menyampaikan visi global mengenai SDGs.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB, turut berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Ridho et al., 2018). Salah satu pusat ekonomi dan industri yang memiliki peran penting dalam konteks ini adalah Kota Batam. Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam telah menjadi destinasi utama untuk investasi dan pengembangan ekonomi di Indonesia (Munir et al., 2023) .

Kota Batam, sebagai salah satu pusat ekonomi di Indonesia, turut merespon tantangan global ini. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem, Kota Batam berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan penanaman modal. Penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pekerjaan yang layak, mengembangkan industri, mendorong inovasi, dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan sebagaimana terdapat dalam Tujuan SDGs.

Investasi merupakan hal yang penting bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam (Ningsih & Sari, 2018). Sebagai salah satu wilayah industri yang cukup maju di Indonesia,



yang berkembang di Kota Batam diantaranya adalah manufaktur, pariwisata dan perdagangan (Harefa, 2013). Kemudahan dalam

berinvestasi didukung oleh lokasi Batam yang strategis dalam perdagangan internasional, insentif seperti pembebasan bea masuk, PPN, dan PPh, infrastruktur yang modern, biaya investasi yang kompetitif bagi export-oriented industri, lingkungan yang bersih dan sehat, serta keamanan dan kenyamanan.

Pada tahun 2022, realisasi investasi Batam mencapai Rp. 13,63 Triliun. Realisasi didominasi oleh penanaman modal asing sebesar 82% atau setara Rp. 11,11 Triliun dengan jumlah proyek 1.738. Disisi lain, penanaman modal dalam negeri di Batam mencapai Rp. 2,52 Triliun dengan total 2.153 proyek. Mengingat lokasi Batam yang strategis untuk ekspor-impor, tidak heran jika Batam memiliki peluang besar bagi investor asing.

Secara keseluruhan, lima besar sektor yang menjadi minat investor yaitu yang pertama, Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam dengan realisasi investasi Rp. 4,24 Triliun. Kedua, Industri Kimia dan Farmasi dengan realisasi investasi Rp. 2,46 Triliun. Ketiga, Industri Makanan dengan realisasi investasi Rp. 2,09 Triliun. Keempat, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan total realisasi Rp. 1,14 Triliun. Kelima yaitu Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya dengan realisasi Rp. 0,94 Triliun. Dari kelima besar sektor tersebut, hanya sektor Perumahan,

dan Industri dan Perkantoran yang didominasi oleh investor dalam



Investasi asing Batam tidak hanya datang dari negara Asia saja, melainkan juga dari negara-negara Eropa. Jika dikaji lebih lanjut, 64% investasi asing berasal dari negara Singapura. Negara Eropa seperti Perancis dan Jerman menduduki posisi kedua investasi asing Batam terbesar. Adapun yang menduduki posisi lima besar lainnya adalah Taiwan dan Hongkong. Dalam hal pencapaian investasi, BP Batam senantiasa berusaha untuk menjadikan Batam sebagai destinasi unggulan investasi melalui berbagai cara, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur.

H. Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam selalu mendorong pembangunan Kota Batam untuk mendukung investasi di Kota Batam. Menurutnya apabila pembangunan berhasil dilakukan maka perekonomian dalam hal ini investasi hingga ekspor menjadi lebih terjamin dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Batam.

Investasi yang terjadi mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Akibatnya, dampak yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi landasan atau tumpuan Kota Batam untuk melakukan pembangunan berkelanjutan terhadap daerahnya. Indikator tujuan ke-8 dan ke-9 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) ialah berfokus pada pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, industri,

dan juga infrastruktur. Tujuan tersebut memiliki hubungan terhadap man modal secara tidak langsung, dikarenakan ekspor, dan impor



serta industri yang terdapat di Kota Batam memiliki peranan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam.

Menimbang hal tersebut Peneliti memiliki maksud untuk mengkaji **“Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Kebijakan Penanaman Modal di Kota Batam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam penanaman modal di Kota Batam?
2. Bagaimana implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) terkait industri, inovasi dan infrastruktur dalam penanaman modal di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam penanaman modal di Kota Batam.
2. Menganalisis implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) terkait industri, inovasi, dan infrastruktur dalam penanaman modal di Kota Batam.



1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan Akademis, diharapkan dapat mengembangkkn ilmu pengetahuan di ilmu pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian mampu memberikan manfaat maupun masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Batam dalam menetapkan kebijakan.
3. Kegunaan Teoritis, diharapkan penelitian ini dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran dan ide.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (LONDAH et al., 2018). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Mamonto et al., 2018).

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok untuk mewujudkan tujuan kebijakan manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Implementasi mencakup banyak macam kegiatan, badan-badan ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, dan uang, dan badan-badan juga mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi

arahan konkret.



Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 2007). Sedangkan menurut pressman dan wildavsky sebagai pelopor studi implementasi mereka mengatakan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagai mana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Implementasi memiliki inti kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan diwujudkan (Purwanto, 2015).

Van Meter Horn mendefisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu: “ *those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions*, Artinya : “ tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam an kebijakan”



Upaya untuk memahami Implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan Pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses siklus kebijakan (*part of the stage of policy process*). Pendekatan Kedua, Implementasi dilihat sebagai suatu bidang kajian (*field of study*), Implementasi sebagai suatu studi memiliki berbagai elemen penting, yaitu: Subject matter (ontology), cara memahami objek yang di pelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang di perlukan (aksiologi). Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara pada mekanisme suatu system. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan di lakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di pengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Sørensen, 2020). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan



ntasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya in dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab

melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Joko, 2020).

Dengan demikian implemntasi adalah serangkaian aktivitas tersebut melibatkan penyusunan serangkaian peraturan tambahan yang merupakan penafsiran dari kebijakan yang bersangkutan. Contohnya, dari suatu undang-undang dapat menghasilkan sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau Peraturan Daerah. Selain itu, juga melibatkan persiapan sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, serta penentuan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut, serta bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan secara konkret kepada Masyarakat.

2.2. Konsep Implementas Kebijakan Merile Grindle

Merilee Grindle, seorang ahli kebijakan publik terkenal, memperkenalkan konsep yang mendalam tentang implementasi kebijakan



teorinya yang dikenal sebagai "The Implementation Game."

Grindle, implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kebijakan itu sendiri harus jelas dan konsisten, dengan tujuan dan strategi yang terdefinisi dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan. Konteks implementasi, termasuk kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Aktor utama dalam implementasi kebijakan meliputi pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan kelompok kepentingan, yang semuanya memiliki peran dan kepentingan yang beragam.

Tahapan implementasi mencakup pengambilan keputusan dan pelaksanaan konkret di lapangan. Keberhasilan kebijakan diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam distribusi manfaat. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, dukungan dari otoritas yang lebih tinggi, komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta komitmen dan kapabilitas pelaksana sangat menentukan hasil akhir dari implementasi kebijakan. Dengan memahami dan mengelola semua variabel ini, pembuat kebijakan dapat merancang strategi implementasi yang lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan mencakup tujuan, sasaran, dan strategi yang dirancang untuk mencapainya. Misalnya, kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan harus jelas menetapkan target spesifik



peningkatan kualifikasi guru atau perbaikan infrastruktur sekolah. Kejelasan dan konsistensi dalam isi kebijakan sangat penting karena

membantu mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa semua pihak memahami apa yang diharapkan.

2. Konteks Implementasi (Context of Implementation)

Konteks di mana kebijakan diimplementasikan sangat berpengaruh. Faktor-faktor seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di suatu wilayah dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Misalnya, dalam konteks politik yang stabil dan dukungan pemerintah yang kuat, implementasi kebijakan mungkin lebih lancar dibandingkan dengan situasi yang penuh dengan konflik dan ketidakpastian.

Teori implementasi kebijakan Merilee Grindle memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami proses implementasi kebijakan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada interaksi yang kompleks antara kebijakan itu sendiri, konteks implementasi, aktor yang terlibat, dan sumber daya yang tersedia.

2.3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep Sustainable Development Goals atau SDGs dicanangkan pada kegiatan konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang akan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan yang dihasilkan dalam konferensi tersebut ialah memperoleh pencapaian



tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan global yang dimana mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda untuk rencana aksi yang ditujukan untuk manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian dan kerjasama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Ramadhani, 2020).

Menurut Ban Ki-Moon selaku mantan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, agenda baru ini merupakan janji para pemimpin dunia kepada semua orang merupakan visi universal, terintegrasi, dan transformatif untuk dunia yang lebih baik, untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya. Agenda untuk planet ini, sebagai rumah bersama. Agenda untuk berbagi kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan yang menyampaikan urgensi aksi iklim (HADIANTO et al., 2019). Yang berakar pada kesetaraan jender dan penghormatan atas hak semua orang. Di atas segalanya, merupakan suatu janji untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam pencapaiannya.

SDGs sebagai keberlanjutan dari program Millennium Development Goals (MDGs) juga disusun berdasarkan tujuan yang ada pada program tersebut yang telah dijalankan mulai tahun 2000 sampai berakhirnya di tahun 2015 dan akan membentuk untuk mencapai tujuan global yang



an di tahun 2030 nanti yakni pembangunan berkelanjutan (Eberling kau, 2024). Permasalahan yang di akomodir didalam SDGs

merupakan permasalahan yang lebih lengkap dan tidak diakomodir didalam MDGs dengan menargetkan setiap tujuan dan sasaran di selesaikan secara tuntas. Dalam SDGs, terdapat 17 Tujuan dan 169 sasaran dan setiap Negara mempunyai peran, kedudukan dan tanggung jawab yang sama untuk turut andil dalam pembangunan dan pencapaian tujuan dan sasaran SDGs.

Sustainable development dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumberdaya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumber daya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumberdaya alam untuk pembangunan, harus seimbang dengan hasil 8 produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa



dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi

mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

2.3.1. Strategi dan Implementasi menggapai Sustainable Development Goals di Indonesia.

Pada tahun 2000-2015 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) memiliki program pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) kemudian setelah berakhirnya program MDGs dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah disahkan pada akhir September 2015. Program pembangunan SDGs ini ingin dicapai sampai tahun 2030 (Nikensari et al., 2019).



SDGs sebagai pengganti MDGs karena daya dukung alam terhadap manusia semakin menurun sehingga perlu penyelamatan (Nikensari, 2016). Penurunan daya dukung alam itu seperti jumlah

penduduk dunia yang terus meningkat, akibatnya akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan pemanfaatan SDA ini yang dikhawatirkan akan merusak lebih jauh lautan dan daratan sebagai sumber nutrisi manusia. Kebutuhan manusia akan bahan pangan, energi dan kebutuhan lainnya yang berasal dari hutan terus meningkat. Kehidupan penduduk lokal, terutama yang berada di sekitar pantai dan hutan, terancam oleh bahaya banjir dan kekeringan. Karena itu, muncul kesadaran baru diantara negara-negara di dunia bahwa pola produksi dan konsumsi yang selama ini terjadi, dilihat dari sisi lingkungan, tidak berkelanjutan.

2.3.2. Tujuan Sustainable Development Goals (Sdgs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian 17 tujuan pembangunan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Indrianti, 2022). Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi manusia, mulai dari kemiskinan ekstrem hingga ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Berikut adalah 17 tujuan SDGs :



Gambar 1. Sustainable Development Goals



Sumber: United Nation, Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development

- 1) Tanpa Kemiskinan (No Poverty) : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia, termasuk kemiskinan ekstrem, dengan memastikan akses semua orang terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) : Mencapai ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memastikan akses semua orang terhadap pangan yang bergizi, aman, dan terjangkau sepanjang tahun.
- 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well-being) : Memastikan semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk imunisasi, pencegahan penyakit, pengobatan, dan promosi kesehatan mental.



- 4) Pendidikan Berkualitas (Quality Education) : Mengakhiri kesenjangan pendidikan, memastikan akses semua anak-anak dan orang dewasa terhadap pendidikan yang berkualitas, relevan, dan inklusif.
- 5) Kesetaraan Gender (Gender Equality) L: Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan gadis-gadis, termasuk akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 6) Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation) : Memastikan akses semua orang terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta meningkatkan manajemen air dan sanitasi untuk mengurangi polusi dan penularan penyakit.
- 7) Energi Terjangkau dan Bersih (Affordable and Clean Energy) : Mendorong akses semua orang terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan.
- 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth) : Menciptakan peluang pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure) : Mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif, serta meningkatkan akses semua orang terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
- 10) Ketimpangan yang Dikurangi (Reduced Inequality) : Mengurangi kesenjangan dalam dan antara negara, termasuk kesenjangan



pendapatan, serta mempromosikan keadilan sosial, ekonomi, dan politik.

11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities) Membuat kota dan permukiman menjadi inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan manajemen perkotaan.

12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production) Mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, termasuk mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengurangi dampak lingkungan.

13) Tindakan Terhadap Perubahan Iklim (Climate Action) Mengambil tindakan segera dan ambisius untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap bencana alam.

14) Kehidupan Bawah Air yang Berkelanjutan (Life Below Water) Melindungi dan memulihkan ekosistem laut dan pesisir, serta mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

15) Kehidupan Darat yang Berkelanjutan (Life on Land) Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pengelolaan hutan, lahan kering, dan keanekaragaman hayati darat secara berkelanjutan, serta menghentikan kerusakan lahan dan degradasi.

16) Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (Peace, Justice, and Strong Institutions) Membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan



berkeadilan, serta memperkuat lembaga-lembaga yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals)
Memperkuat kemitraan global untuk mencapai semua tujuan, dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan SDGs tersebut saling terkait dan saling mendukung, membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu pembangunan global menuju masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui kolaborasi dan aksi bersama, diharapkan bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai pada atau sebelum tahun 2030, menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.

2.3.3. Sustainable Development Goals Tujuan ke-8

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) merupakan serangkaian komitmen global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh manusia di seluruh dunia. Salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah Tujuan ke-8, yaitu "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi".

Tujuan ke-8 SDGs menekankan pentingnya menciptakan kesempatan pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif,



pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam esensi, tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya

berdampak positif bagi beberapa segmen masyarakat, tetapi juga menyentuh dan meningkatkan kualitas hidup semua orang, termasuk yang terpinggirkan dan rentan. Dalam rangka memahami Tujuan ke-8 dengan lebih mendalam, mari kita jelajahi berbagai aspek yang tercakup di dalamnya.

tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan pekerjaan layak bagi semua orang. Pekerjaan yang layak tidak hanya mencakup upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, tetapi juga menawarkan keamanan kerja, hak-hak pekerja, dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini berarti mengurangi tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda dan perempuan, serta memastikan bahwa pekerjaan informal bertransformasi menjadi pekerjaan formal yang memberikan perlindungan sosial.

Selanjutnya, Tujuan ke-8 menggaris bawahi pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya memperkaya segelintir orang atau kelompok, tetapi harus merata dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Upaya ini dapat mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, serta dukungan kepada sektor-sektor ekonomi yang

isi besar dalam menciptakan lapangan kerja.



Selain itu, tujuan ini juga menyoroti pentingnya membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, transportasi publik, sumber energi yang bersih dan terbarukan, serta akses yang lebih baik terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Selanjutnya, untuk mencapai Tujuan ke-8, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Ini mencakup kebijakan yang mendukung investasi dalam lapangan pekerjaan yang layak, insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan ekonomi inklusif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, untuk melacak kemajuan dalam mencapai Tujuan ke-8, diperlukan data yang akurat dan terkini. Pengumpulan data yang baik dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran dan mengevaluasi dampak dari program-program yang telah dilaksanakan.

Namun, meskipun Tujuan ke-8 menawarkan pandangan yang ; dan inklusif tentang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan n kerja, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Di



antaranya adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dari segi lingkungan, serta kurangnya akses terhadap pekerjaan layak bagi sebagian besar masyarakat.

Dengan demikian, untuk mencapai Tujuan ke-8 SDGs, diperlukan komitmen dan tindakan bersama dari semua pihak. Hanya dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Sebuah dunia di mana tidak ada yang tertinggal.

2.3.4. Sustainable Development Goals Tujuan Ke- 9

Tujuan 9 dari Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah pada membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan ini mencerminkan kesadaran akan perlunya mengembangkan ekonomi yang kuat dan inklusif tanpa merusak lingkungan yang menjadi dasar kehidupan kita.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh adalah langkah awal yang krusial dalam proses pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang mencakup berbagai bidang, termasuk transportasi, energi, air sanitasi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Akses yang

ii terhadap infrastruktur ini memainkan peran kunci dalam



meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara negara maju dan berkembang.

Salah satu aspek penting dari pembangunan infrastruktur adalah memastikan bahwa infrastruktur tersebut tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga ramah lingkungan. Langkah-langkah seperti memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, mengurangi emisi karbon, dan memperhatikan dampak lingkungan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Promosi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan komponen penting dari upaya untuk mencapai SDG 9. Industrialisasi yang inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil di antara semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan dan marginal. Sementara itu, industrialisasi yang berkelanjutan menekankan pentingnya mengadopsi teknologi dan praktik produksi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Penting untuk diingat bahwa industrialisasi yang berkelanjutan bukan hanya tentang melindungi lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri yang



pada sumber daya lokal dan inovasi teknologi. Dengan kuat kapasitas industri lokal, terutama di negara-negara

berkembang, SDGs 9 berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kedaulatan ekonomi.

Inovasi merupakan pendorong utama dari pembangunan berkelanjutan. Inovasi teknologi, produk, dan model bisnis memberikan solusi baru untuk tantangan pembangunan, termasuk di bidang energi terbarukan, transportasi hijau, manajemen air yang efisien, dan banyak lagi. Melalui investasi dalam riset dan pengembangan serta dukungan untuk kewirausahaan dan pemikiran kreatif, SDGs 9 bertujuan untuk mempercepat laju inovasi dan mengarahkannya ke arah yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya kolaborasi global tidak dapat dilebih-lebihkan dalam mencapai Tujuan 9. Kerja sama internasional dalam transfer teknologi, pengetahuan, dan sumber daya finansial sangat penting untuk mempercepat progres dalam pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, Tujuan 9 SDGs adalah tonggak penting dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, kita dapat menciptakan dunia di mana kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup dapat beriringan.



2.4. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang (Hayati, 2016). Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri.

Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi (Sari et al., 2016). Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan. Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan (Moy & Daryono Soebagiyo, 2021). Pandapat tentang pentingnya investasi dalam manunjang pembangunan negara-negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan setelah perang dunia ke II yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.



ada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu nan modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan anisasi baik dalam negeri maupun luar negeri (Aminuddin Ilmar,

2010). Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Hayati, 2016). Oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan se bagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil/keuntungan (Nasution, 2017).

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, Investasi dapat diartikan sebagai : 1) suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya; 2) suatu tindakan membeli barang modal; 3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang (Utomo & Hasibuan, 2023).

Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi terkait dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasi pertumbuhan dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi akan merangsang pertumbuhan



ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi

Dalam teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Agregasi investasi dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.” Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian.

2.4.1. Investasi Dalam Negeri

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam alam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.



Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh kaum Neo-Klasik menekankan peranan modal yang dimiliki suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Investasi dalam negeri atau yang juga dikenal dengan nama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Jufrida et al., 2016)

Hasil penelitian Trisnu dan Purbadharmaja (2014), Jufrida, dkk (2016), Ibrahim dan Dahie (2016), Emmanuel dan Kehinde (2018) Mahrisa dan Amar (2019), Tran dan Hoang (2019) menunjukkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan hasil penelitian Lean dan Tan (2011) menunjukkan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Jufrida et al., 2016).

2.4.2. Investasi Luar Negeri

Menurut UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.



Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan negara-negara berkembang. Ini mempengaruhi skenario

pekerjaan, produksi, harga, pendapatan, impor, ekspor, kesejahteraan umum negara penerima, dan neraca pembayaran dan berfungsi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekonomi (Utomo & Hasibuan, 2023).

2.5. Kebijakan dan Peraturan

Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu, analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis dan dapat dirunut sejak adanya peradaban umat manusia. Sejak itu, kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wahab, 2008). Kebijakan public merupakan keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan Tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan public, yakni masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan public diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili system politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrument pemerintah untuk melakukan suatu Tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum,



rtasi, Pendidikan, Kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-
ng dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan

warganya. Pengertian lainnya, kebijakan public hanya sebatas dokumen-dokumen resmi seperti perundang-undangan, dan peraturan-peraturan pemerintah. Namun sebagian lagi mengartikan kebijakan sebagai pedoman acuan, strategi dan kerangka Tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Didasari variasi pengertian kebijakan public begitu luas dan tidak dapat dihindari, karena istilah kebijakan berupaya menjelaskan secara ringkasan berbagai Tindakan mulai dari mencermati isu atau masalah, merumuskan formulasi dan memutuskan, sampai pada implementasi, monitoring dan evaluasi. Tulisan ini mengacu pada pengertian bahwa setiap perundang-undangan dan peraturan adalah kebijakan, akan tetapi tidak setiap kebijakan diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan. Dalam konteks pengertian kebijakan publik seperti tersebut, teridentifikasi dimensi-dimensi yang saling bertautan antara kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal secara hukum, kebijakan publik sebagai hipotesis dan kebijakan publik sebagai tujuan (Bridgeman dan Davis, 2004).

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal karena dibuat oleh orang yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan-keputusannya mengikat aparatur pemerintah bertindak dalam menyiapkan rencana perundang-undangan dan an pemerintah untuk di pertimbangkan oleh parlemen atau



mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. Kebijakan sebagai keputusan legal bukan juga berarti bahwa pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menangani berbagai isu dan masalah publik. Setiap pemerintahan biasanya bekerja berdasarkan warisan kebiasaan-kebiasaan pemerintahan terdahulu. Rutinitas birokrasi yang diterima biasanya merefleksikan keputusan kebijakan lama yang sudah terbukti efektif jika diterapkan. Dalam konteks ini, penting dikembangkan proses kebijakan yang partisipatif dan dapat diterima secara luas sehingga dapat menjamin bahwa usulan dan aspirasi masyarakat dapat diputuskan secara teratur dan mencapai hasil yang baik.

Kebijakan publik sebagai hipotesis artinya kebijakan dibuat berdasarkan teori dan proposisi-proposisi sebab akibat. Oleh karena itu, kebijakan hendaknya bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Hal ini penting agar kebijakan selalu mendorong orang untuk melakukan sesuatu, serta mampu memprediksi keadaan dan menyatukan perkiraan - perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dengan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Namun kebijakan bukanlah laboratorium tempat uji coba, karena sulit untuk mengevaluasi asumsi-asumsi perilaku sebelum sebuah kebijakan benar-benar dilaksanakan. Pemerintah mungkin memperkirakan bahwa sebuah paket pengurangan



paik akan mendapat respon positif dari rakyat. Tetapi, hingga pemerintah

numkan pengurangan tersebut dan mengukur dampaknya, para

pengambil kebijakan harus selalu waspada karena akibat yang ditimbulkan kebijakan tersebut belum tentu sesuai dengan perkiraan sebelumnya.

Dalam konteks tersebut, pelajaran dan temuan-temuan dari implemetasi, monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting. Artinya, pembuatan kebijakan yang baik didasari kemampuan dalam memahami pelajaran pelajaran dari pengalaman-pengalaman kebijakan dan menerapkan pelajaran itu dalam Langkah perumusan kebijakan berikutnya. Oleh karena banyaknya pemain dan kepentingan dalam sebuah perumusan kebijakan, mengintegrasikan pengalaman penerapan kebijakan dengan perbaikan kebijakan berikutnya tidak selalu mudah dilakukan. Temuan-temuan dilapangan mengenai konsekwensi-konsekwensi kebijakan perlu dicatat dan didokumentasikan secara baik dalam sebuah naskah kebijakan sehingga dapat di pelajari dan disebarluaskan.

Berkaitan dengan kebijakan publik sebagai tujuan dimaksudkan kebijakan menjadi alat untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, kebijakan publik adalah sep erangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk m encap ai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik. Pembuat kebijakan harus mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, karena kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan ulkan masalah baru. Misalnya, sebuah kebijakan yang tidak i tujuan jelas, program-programnya akan diterapkan secara a-beda, strategi pencapaiannya menjadi kabur, dan akhirnya para



analisis dan kritikus akan menyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan arah. Dalam kenyataannya, pemerintah membuat kebijakan seringkali kehilangan arah dalam penetapan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali dipandang lebih penting dari masalah. Padahal yang terjadi seringkali sebaliknya dimana sebuah solusi yang baik akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah. Dalam konteks ini, identifikasi masalah dan kebutuhan menjadi sangat penting. Oleh karena itu kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan yang baik akan dapat merumuskan secara eksplisit pernyataan resmi mengenai pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan teori, proposisi dan model sebab-akibat yang mendasari kebijakan, serta hasil-hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Artinya, dalam sebuah lingkaran perumusan kebijakan, pilihan-pilihan tindakan yang legal dibuat berdasarkan hipotesis dari proposisi-proposisi berbagai teori guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Rumusan yang sederhana ini menunjukkan hubungan antara ketiga dimensi kebijakan di atas. Artinya, kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal, sebagai hipotesis dan sebagai tujuan merupakan tiga serangkai yang saling berkaitan satu sama lain sehingga ketiganya merupakan prasyarat sekaligus tantangan bagi kebijakan publik yang efektif.



tilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna.

1) penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah

bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki outcomes dimasa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan.

Anderson memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi (Winarno. 2007 : 18). Kebijakan berkaitan dengan tindakan. Sebagaimana diungkapkan Suskind, seorang penulis yang dekat dengan pejabat gedung putih masa George W. Bush, “ketika kita melakukan tindakan berarti kita telah membuat suatu realitas dan ketika kita membuat tindakan baru, maka kita juga membuat realitas baru” (Nur & Guntur, 2019).



Istilah kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh berbeda kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan an yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik

dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Goldstein & Keohane, 1993). Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Haerul et al., 2016).

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik benang merah bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Ide kebijakan di atas melibatkan apa yang disebut Easton sebagai alokasi nilai-nilai (the allocation of values) dan memiliki konsekuensi distribusional. Kebijakan dalam arti khusus, berkaitan dengan ruang publik. Kebijakan berada pada ruang hidup di luar kepentingan privat individu atau kelompok. Namun demikian, sebagaimana dicatat Ranson and Steward domain publik yang mewarnai kebijakan publik memiliki peran esensial dalam mengklarifikasi, menyatakan, dan mewujudkan tujuan-tujuan publik, yang juga menjadi tujuan para individu atau kelompok secara keseluruhan (Affandi, 2022). Apa yang dikemukakan Anderson, Budiardjo, Friedrich, Post, et al., serta Greer and Paul Hoggett mengenai konsep kebijakan terdapat kesamaan, yaitu mereka sama-sama memfokuskan diri pada suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan naksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan atau sasaran



dimaksud adalah tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau kelompok tertentu.

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri (Subianto, 2020). Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2023).

Kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan (Parsons 2005). Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimengerti sebagai

persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan
aan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar



(setting) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.

Perspektif kekuasaan tersebut dapat digunakan dalam memandang relasi antara rakyat dan negara, misalnya dalam melihat hubungan antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah kota Semarang. Pedagang kaki lima (PKL) dalam perspektif kebijakan publik, berada pada posisi pihak yang seharusnya dilayani, sedangkan pemerintah kota Semarang beserta aparaturnya merupakan pihak yang sudah semestinya memberi pelayanan melalui kebijakan yang diambil. Hal ini sangat beralasan.

Dalam realitas relasi pemerintah-masyarakat, sebagai pihak yang menguasai sumber daya politik, ekonomi, budaya, dan militer, pemerintah berada pada posisi superordinat, yakni pihak yang sangat berkuasa dalam mengatur dan mengendalikan warga masyarakat, termasuk di dalamnya pedagang-pedagang kecil seperti halnya PKL. Dalam posisi ini, pemerintah kota dengan segala kebijakannya harus ditaati dan dipatuhi oleh PKL. Perda Kota Semarang nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah kota Semarang yang harus ditaati pedagang kaki lima. PKL sebagai pihak subordinat, harus siap diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam konteks relasi kuasa, yang dikhawatirkan adalah jika kebijakan publik yang ditempuh Pemkot merupakan perencanaan

berdik (scheming), sebagaimana ditulis Marlowe, yaitu menciptakan



atau merekayasa sebuah ceritera yang masuk akal dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perekayasa (Kaki & Pkl, n.d.).

Sesuai dengan konsep kebijakan publik di atas, pemerintah dapat melakukan banyak hal, mulai dari mengelola konflik dalam masyarakat, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai penghargaan atau hadiah dan layanan material kepada anggota-anggota masyarakat, hingga menarik uang dari masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk pajak.

Berdasarkan gambar di atas, kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi, dan pengangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia hidup, ketidaksamaan dan diskriminasi. Kelembagaan, proses, dan perilaku dalam sistem politik mencakupi federalisme, pemisahan kekuasaan, sistem perimbangan kekuasaan, kepartaian, kelompok kepentingan, perilaku voting, birokrasi, struktur kekuasaan, serta kongres, Presiden, dan pengadilan. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kondisi masyarakat yang direspon dan diolah dalam sistem politik, dapat berupa hak-hak sipil, kebijakan pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan peraturan-peraturan.



2.6. Kerangka Berpikir

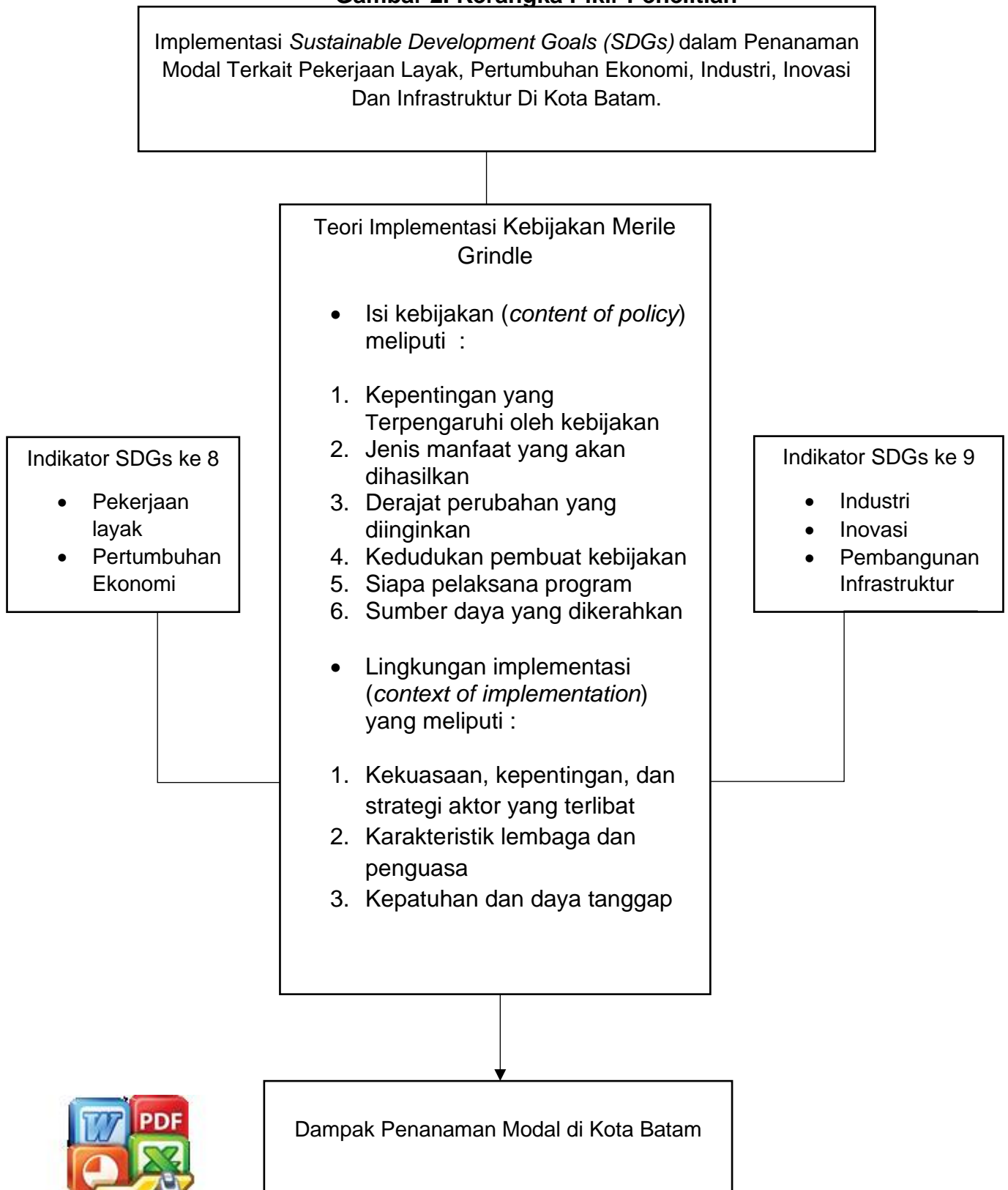
Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan pembangunan wilayah menggunakan dana investasi sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengusahaan Kota Batam merupakan organisasi yang mengelola usaha dan investasi yang berada di Kota Batam. Badan Pengusahaan Kota Batam berwenang untuk mengatur dan menilai investasi yang diberikan oleh investor baik dari pihak asing maupun pihak dalam negeri sendiri. Badan Pengusahaan Kota Batam bertujuan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam kebijakan penanaman modal yang terjadi di Kota Batam. Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu Kerangka Konsep yang dijabarkan melalui skema berikut.



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Batam dengan pertimbangan bahwa melihat diterapkannya beberapa wilayah di Kota Batam ditetapkan sebagai Free Trade Zone (FTZ) atau biasa yang disebutkan sebagai zona perdagangan bebas.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam, dengan fokus pada makna, interpretasi, dan pengalaman subjek yang terlibat. Metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, antropologi, dan bidang lain di mana peneliti ingin menjelajahi dan memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis dari suatu fenomena.

3.3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal.
- 2) Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kota Batam
- 3) Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja Badan Pengusahaan Kota Batam

